

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB), DANA PERIMBANGAN, DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA
TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

SIGIT HANAFI SULISTYO

NIM. 12020112130103

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Sigit Hanafi Sulistyio
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112130103
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB), DANA
PERIMBANGAN, DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
ALOKASI BELANJA DAERAH DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA
TENGAH**

Dosen Pembimbing : Fitrie Arianti, S.E., M.Si.

Semarang, 22 Juni 2016

Dosen Pembimbing,

(Fitrie Arianti, S.E., M.Si.)

NIP. 197811162003122003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Sigit Hanafi Sulistyo
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112130103
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP
Judul Skripsi : **PENGARUH PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB), DANA
PERIMBANGAN, DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP ALOKASI
BELANJA DAERAH DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA
TENGAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 12 Juli 2016

Tim Penguji

1. Fitrie Arianti, S.E., M.SI. (.....)
2. Drs. Eddy Yusuf A.G., M.Sc., Ph.D. (.....)
3. Darwanto, S.E., M.Si. (.....)

Mengetahui

Pembantu Dekan I,

(Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.)

NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sigit Hanafi Sulisty, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Hanafi Sulisty)

NIM: 12020112130103

ABSTRACT

The implementation of local autonomy and fiscal decentralization in Indonesia is an strategic step to increase the local independence in the financial and strengthen the local economy base. Consequences of the implementation of local autonomy and fiscal decentralization is devolution that followed the budget allocation and the provision of public goods to local authorities. Although the local has been given great authority to manage potential sources of local revenue, the fact the level of local independence in the financial sector have not shown significant progress. The local government is still dependent on the central government to support development activities and public services for the community at the local level. The financial dependence appears in the gauge of the portion of the balance funds as the largest source of income for the region.

This research aims to prove empirically the influence of gross regional domestic product, balance funds, and regionally original revenue to local government expenditure in regencies and cities at Central Java Province.

The data that used in this research are quantitave data with the type of panel data in the form of an annual. Time series data started from the period 2007 to 2014, while its cross section data are 35 regencies and cites in Central Java Province. From the merger of two kinds of data has yielded 280 observations. The analysis method that used is panel data regression with fixed effects model approach.

The important findings of this research indicate that gross regional domestic product, balance funds, and regionally original revenue have significant impact on local government expenditure of regencies and cities at Central Java Province.

Keywords: Local government expenditure, gross regional domestic product, balance funds, and regionally original revenue

ABSTRAK

Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan satu langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan memperkuat basis perekonomian daerah. Konsekuensi penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang yang diikuti alokasi anggaran dan penyediaan barang publik pada pemerintah daerah. Meskipun daerah telah diberikan kewenangan yang besar untuk mengelola potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, kenyataannya tingkat kemandirian daerah di bidang keuangan belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Pemerintah daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat untuk menopang kegiatan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat di tingkat lokal. Ketergantungan keuangan tersebut nampak dalam besarnya porsi dana perimbangan sebagai sumber pendapatan terbesar bagi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh produk domestik regional bruto, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan jenis data panel dalam bentuk tahunan. Data *time series* dimulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, sedangkan data *cross section*-nya adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari penggabungan kedua data tersebut, diperoleh 280 observasi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan model efek tetap.

Temuan penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: belanja daerah, produk domestik regional bruto, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.** Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari bahwa bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Tamirin dan Ibu Endang Yatminingsih, S.Pd. yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi penulis.
2. Dr. Suharnomo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Fitrie Arianti, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing, terimakasih atas bimbingan, arahan, nasihat, serta kesabaran dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Darwanto, S.E., M.Si. selaku dosen wali, yang telah memberikan bimbingan, do'a, pengarahan, dan motivasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf dan pegawai Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, terimakasih telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Novita Kristiani, terimakasih untuk kasih sayang dan dorongan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
8. Sahabat Emily Group: Arva, Yassir, Ferrysal, Debik, Zaki, Jordy, Fauzi, Wisnu, Adit, Haka, Sindhu, Fauzan, Syihab. Terimakasih atas canda tawa yang tak pernah henti kalian berikan dan berbagai pengalaman yang tak akan pernah terlupakan.
9. Sahabat Pria Sholeh: Alan, Saka, Mursyid, Risang, Yugo, Arba, Husain, Salman. Terimakasih untuk motivasi dan diskusi berbagai macam ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Teman-teman IESP 2012, terimakasih atas semangat, motivasi, kerjasama, suka, dan canda tawa yang kalian berikan dan terimakasih telah menemani penulis menjalani kuliah selama 4 tahun.

Semarang, 22 Juni 2016

Penulis

Sigit Hanafi Sulistyio

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	14
1.3.2 Kegunaan Penelitian	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	17
2.1 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.1.1 Model Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Rostow-Musgrave ...	18
2.1.2 Teori Peacock dan Wiseman.....	18
2.1.3 Hukum Wagner	19
2.2 Pendapatan Regional	20

2.3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	21
2.4	Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	22
2.5	Belanja Daerah	25
2.6	Hubungan PDRB, Dana Perimbangan, dan PAD dengan Belanja Daerah.....	27
2.7	Penelitian Terdahulu.....	28
2.8	Kerangka Pemikiran	31
2.9	Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	33
3.2	Populasi.....	34
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	34
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	35
3.5	Metode Analisis.....	35
3.5.1	Regresi Data Panel	36
3.5.2	Pengujian untuk Memilih Pendekatan Data Panel Terbaik	37
3.5.3	Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	38
3.5.3.1	Deteksi Normalitas.....	38
3.5.3.2	Deteksi Multikolinearitas	39
3.5.3.3	Deteksi Heteroskedastisitas	39
3.5.4	Pengujian Validitas Model.....	40
3.5.4.1	Koefisien Determinasi (R^2)	40
3.5.4.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	40
3.5.4.3	Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	41
3.5.5	Spesifikasi Model	41
BAB IV HASIL DAN ANALISIS		43
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	43
4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah	43
4.1.2	Deskripsi Variabel.....	44
4.2	Pengujian Data	48

4.2.1	Pengujian untuk Memilih Pendekatan Data Panel Terbaik	48
4.2.2	Deteksi Asumsi Klasik	49
4.2.2.1	Deteksi Normalitas.....	50
4.2.2.2	Deteksi Multikolinearitas	50
4.2.2.3	Deteksi Heteroskedastisitas.....	51
4.2.3	Pengujian Regresi Linier Berganda.....	52
4.2.3.1	Koefisien Determinasi (R^2)	53
4.2.3.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	53
4.2.3.3	Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	54
4.2.3.4	Cross-section Fixed Effects	55
4.3	Interpretasi Hasil	57
BAB V PENUTUP		61
5.1	Simpulan	61
5.2	Keterbatasan.....	61
5.3	Saran	62
5.4	Implikasi Kebijakan.....	62
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN		66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 4.1 Proporsi Realisasi PAD dan Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2014.....	46
Tabel 4.2 Realisasi Belanja Daerah dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2014.....	48
Tabel 4.1 <i>Redundant Test</i>	48
Tabel 4.2 Uji Hausman.....	49
Tabel 4.3 Deteksi Normalitas.....	50
Tabel 4.4 Deteksi Multikolinearitas.....	50
Tabel 4.5 Deteksi Heteroskedastisitas.....	51
Tabel 4.6 Hasil Regresi.....	52
Tabel 4.7 Intersep per Kabupaten/Kota.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tren Pendapatan Kabupaten se-Indonesia Tahun 2008 – 2013.....	6
Gambar 1.2 Tren Pendapatan Kota se-Indonesia Tahun 2008 – 2013.....	7
Gambar 1.3 Tren Belanja Kabupaten se-Indonesia Tahun 2008 – 2013.....	9
Gambar 1.4 Tren Belanja Kota se-Indonesia Tahun 2008 – 2013.....	10
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran Teoritis.....	31
Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Tengah.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A <i>Redundant Test</i>	66
Lampiran B Uji Hausman.....	67
Lampiran C Uji Normalitas	68
Lampiran D Uji Multikolinearitas.....	68
Lampiran E Uji Heteroskedastisitas.....	69
Lampiran F Hasil Estimasi FEM.....	70
Lampiran G <i>Cross-section Fixed Effects</i>	71
Lampiran H Data Mentah.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diberlakukan secara efektif di Indonesia mulai tahun 2001, hal ini merupakan satu langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian daerah dan memperkuat basis perekonomian daerah (Sasana, 2011). Disahkannya Undang-Undang No. 22/1999 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Undang-Undang No. 25/1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” kontras dengan peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang No. 5/1975 tentang “Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah” yang lebih bersifat sentralistik merupakan tonggak awal diberlakukannya sistem otonomi daerah secara penuh di Indonesia. Sjafrizal (dikutip oleh Siagian, 2010) menjelaskan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah coba diterapkan pada masa orde baru, namun dalam prakteknya kebijakan penerapan kebijakan tersebut selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah dan wilayah. Ketidakpuasan daerah kemudian muncul dan akhirnya melahirkan gerakan reformasi menuntut demokratisasi dan desentralisasi, klimaksnya Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998.

Penerapan desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan daerah. Namun pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut memunculkan fenomena dimana

terjadi banyak kasus dalam penerapannya, yaitu pencapaian dari kedua tujuan itu tidak bisa selalu berjalan beriringan. Pengalihan otoritas pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ternyata tidak dapat dilakukan di semua wilayah. Kebijakan ini memunculkan kesiapan yang berbeda dari setiap daerah. Sebagian besar daerah di berbagai wilayah di Indonesia ternyata tidak siap untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, walaupun ada beberapa daerah yang berhasil dalam pencapaian tujuan dari desentralisasi fiskal tersebut (Sjafrizal dalam Siagian, 2010). Allen (dikutip oleh Kuncoro, 2004) menyatakan bahwa, sejarah perekonomian telah mencatat desentralisasi telah muncul sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan pusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan penuh dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Dalam perkembangannya, aturan formal mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengalami perubahan. Undang-Undang No. 22/1999 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Undang-Undang No. 25/1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” digantikan oleh Undang-Undang No. 32/2004 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Undang-Undang No. 33/2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. Perubahan aturan tersebut terus berlangsung, hingga yang terakhir adalah disahkannya Undang-Undang No. 23/2014 tentang “Pemerintahan Daerah”

sebagai pengganti untuk Undang-Undang No. 32/2004. Meskipun daerah telah diberikan kelimpahan wewenang, namun masih terdapat beberapa wewenang yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Adapun wewenang yang tetap menjadi otoritas pemerintah pusat adalah di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, serta agama. Undang-Undang No. 23/2014 tentang “Pemerintahan Daerah” menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Titik tolak desentralisasi di Indonesia adalah Daerah Tingkat II atau pada level kabupaten/kota, dengan tiga dasar pertimbangan, yaitu kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme minim, dari dimensi administratif penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif, dan yang terakhir kabupaten/kota merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan karena mengetahui kebutuhan dan potensi rakyatnya (Kuncoro, 2004).

Konsekuensi diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang yang diikuti alokasi anggaran dan penyediaan barang publik pada pemerintah daerah. Halim (dalam Sasana, 2011) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi, yaitu pertama kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, yang kedua adalah ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin, hal ini bertujuan agar pendapatan asli daerah dapat menjadi sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi semakin besar. Dalam pelaksanaan desentralisasi peran transfer tidak dapat dihindarkan, mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.

Meskipun daerah telah diberikan kewenangan yang besar untuk mengelola potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, kenyataannya tingkat kemandirian daerah di bidang keuangan belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Pemerintah daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat untuk menopang kegiatan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat di tingkat lokal. Ketergantungan keuangan tersebut terpotret dalam besarnya porsi dana perimbangan sebagai sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Besarnya nilai transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan seharusnya mampu menjadi insentif bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2011) yang menganalisis mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap alokasi belanja daerah di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat dan ditemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian Abdullah dan Halim

(2003), Darwanto dan Yustikasari (2007), serta Devita, dkk (2014) menemukan bahwa transfer pemerintah pusat yang diukur dengan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sementara penelitian Murniasih dan Mulyadi (2011) menggunakan variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebagai pengukur transfer pemerintah pusat dengan studi kasus kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

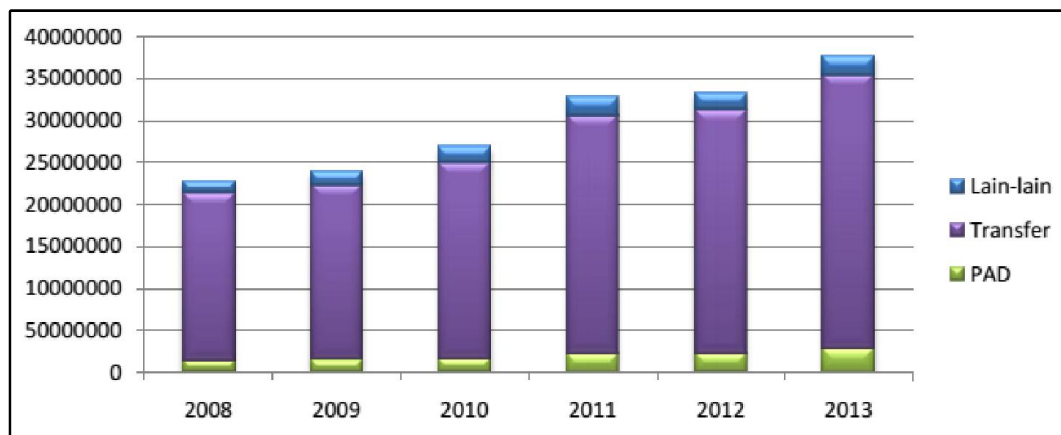
Selain pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat, daerah juga diberikan kewenangan untuk menggali potensi penerimaan daerah secara mandiri dalam bentuk PAD. Penelitian Abdullah dan Halim (2003), Darwanto dan Yustikasari (2007), Murniasih dan Mulyadi (2011), serta Devita, dkk (2014) menemukan bahwa PAD mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Namun pada penelitian lain menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh secara tidak signifikan terhadap belanja pemerintah. Sasana (2011) menemukan pengaruh yang tidak signifikan dari PAD terhadap belanja daerah. Hasil dari beberapa penelitian tersebut mengindikasikan adanya perbedaan kemandirian keuangan daerah serta relatif kecilnya sumbangan PAD terhadap total belanja daerah di masing-masing daerah.

Sementara itu dari sisi makro ekonomi, Sasana (2011) menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap alokasi

belanja modal daerah. Hal ini bermakna bahwa semakin berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, maka semakin meningkat pula alokasi belanja pemerintah daerah sebagai respon terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan pelayanan publik. Akan tetapi, alokasi belanja daerah masih diprioritaskan untuk belanja yang sifatnya konsumtif seperti belanja pegawai.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa tren pendapatan kabupaten pada Gambar 1.1 didominasi transfer. Dari tahun anggaran 2008 sampai 2013, nilai transfer terus mengalami kenaikan. Pada tahun anggaran 2008 nilai transfer sebesar Rp199,9 triliun menjadi Rp325,5 triliun pada tahun anggaran 2013. PAD juga terus mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2008 hingga 2013. Bahkan PAD mengalami kenaikan 100% pada tahun anggaran 2013 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2008, yaitu sebesar Rp14,2 triliun pada tahun anggaran 2008 menjadi Rp28,6 triliun pada tahun anggaran 2013.

Gambar 1.1
Tren Pendapatan Kabupaten se-Indonesia Tahun 2008 – 2013

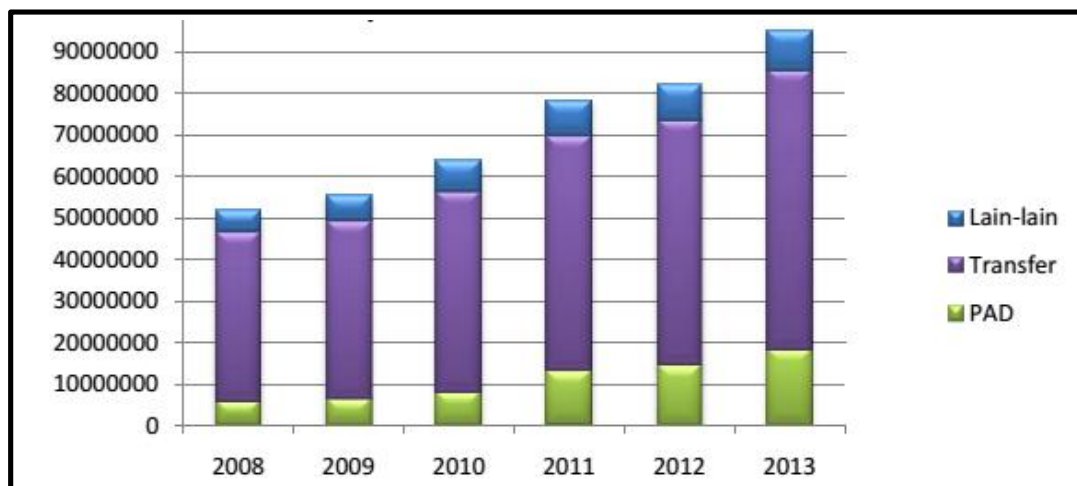


Sumber: Potret APBD Tahun Anggaran 2013 DJPK, Mei 2013, hal 10

Tren pendapatan kota pada Gambar 1.2 memiliki kemiripan dengan tren pendapatan kabupaten, yaitu sama-sama didominasi transfer. Nilai transfer juga terus mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2008 sampai tahun anggaran 2013. Pada tahun anggaran 2008, nilai transfer sebesar Rp40,6 triliun menjadi Rp67,2 triliun pada tahun anggaran 2013. Nilai PAD juga secara konstan mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2008 sampai tahun anggaran 2013. Pada tahun anggaran 2008 PAD kota sebesar Rp5,9 triliun dan pada tahun anggaran 2013 menjadi Rp18,2 triliun.

Besaran transfer pemerintah pusat masih sangat mendominasi sumber pendapatan daerah baik kabupaten maupun kota, sedangkan porsi PAD masih relatif rendah. Dari fenomena tersebut dapat diindikasikan bahwa daerah belum mampu menggali potensi sumber penerimaan sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri.

Gambar 1.2
Tren Pendapatan Kota se-Indonesia Tahun 2008 – 2013

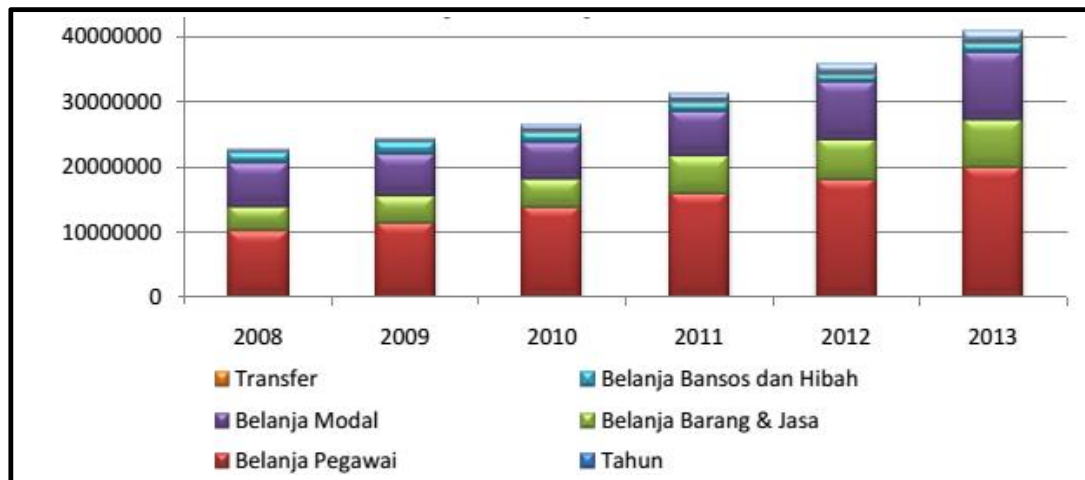


Sumber: Potret APBD Tahun Anggaran 2013 DJPK, Mei 2013, hal 10

Dari sisi belanja, data belanja seluruh kabupaten di Indonesia yang dihimpun oleh DJPK pada Gambar 1.3 menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis belanja yang konsisten mengalami kenaikan nilai dari tahun anggaran 2008 hingga 2013, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Pada tahun anggaran 2008 nilai Belanja Pegawai adalah sebesar Rp101,3 triliun naik menjadi Rp114,5 triliun pada tahun anggaran 2009 kemudian menjadi Rp138,5 triliun pada tahun anggaran 2010. Pada tahun anggaran 2008 nilai Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp37,7 triliun naik menjadi Rp40,7 triliun pada tahun anggaran 2009 kemudian menjadi Rp42,1 triliun pada tahun anggaran 2010.

Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Lainnya merupakan jenis belanja yang sempat mengalami penurunan namun kemudian naik kembali. Belanja Modal sempat mengalami penurunan dari tahun anggaran 2009 ke 2010, yaitu dari Rp64,01 triliun menjadi Rp56,5 triliun. Kemudian mulai dari tahun anggaran 2010 hingga 2013, nilai Belanja Modal secara konsisten naik. Pada tahun anggaran 2010, nilai Belanja Modal sebesar Rp56 triliun naik hingga menjadi Rp102 triliun pada tahun anggaran 2013. Belanja Transfer mengalami penurunan dari tahun anggaran 2010 hingga 2012, yakni sebesar Rp1,3 triliun. Kemudian dari tahun anggaran 2012 ke 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp1,2 triliun. Jenis Belanja Bantuan Sosial dan Hibah merupakan jenis belanja yang mengalami penurunan secara konstan dari tahun anggaran 2009 hingga 2013, yakni sebesar Rp5,9 triliun.

Gambar 1.3
Tren Belanja Kabupaten se-Indonesia Tahun 2008 – 2013

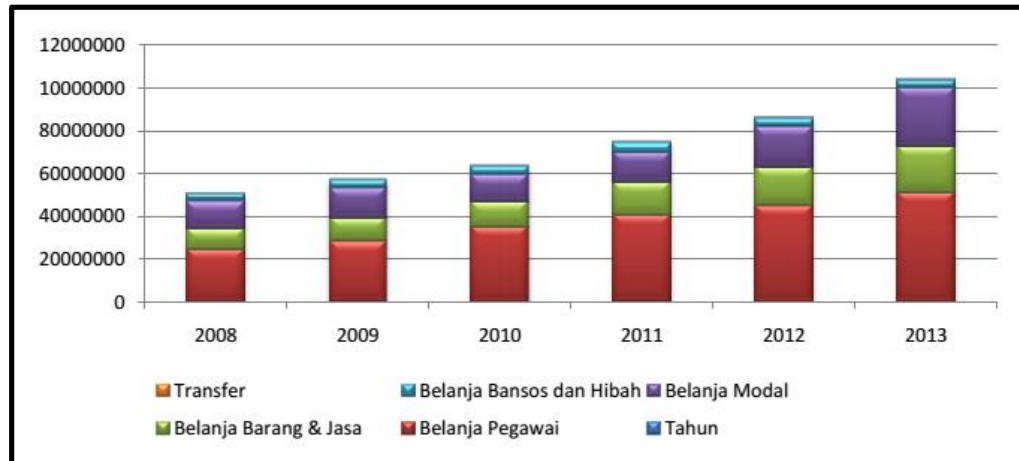


Sumber: Potret APBD Tahun Anggaran 2013 DJPK, Mei 2013, hal 12

Tren belanja kota pada Gambar 1.4 memiliki kemiripan dengan tren belanja kabupaten, 2 jenis belanja yang konsisten mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2008 hingga 2013 adalah Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Dari tahun anggaran 2008 hingga 2013, nilai Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp26,6 triliun. Nilai Belanja Barang dan Jasa juga secara konsisten naik sebesar Rp11,6 triliun dari tahun 2008 sampai 2013.

Belanja Modal dan Belanja Lainnya sempat mengalami penurunan kemudian naik kembali. Belanja Modal sempat mengalami penurunan dari tahun anggaran 2009 ke 2010 sebesar Rp1,5 triliun. Kemudian dari tahun anggaran 2010 hingga 2013, Belanja Modal secara konsisten naik sebesar Rp14,8 triliun. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dan Belanja Transfer memiliki kesamaan yaitu dari tahun anggaran 2011 hingga 2013 mengalami penurunan.

Gambar 1.4
Tren Belanja Kota se-Indonesia Tahun 2008 – 2013



Sumber: Potret APBD Tahun Anggaran 2013 DJPK, Mei 2013, hal 13

Kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama melaksanakan otonomi dan desentralisasi fiskal juga tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Transfer pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) masih menjadi sumber utama pendapatan daerah, sedangkan porsi PAD dalam postur pendapatan daerah masih relatif kecil. Meskipun persentase PAD terhadap total pendapatan daerah memiliki kecenderungan yang meningkat, namun besarnya relatif kecil dibandingkan dana perimbangan. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari segi nominal, dana perimbangan yang digelontorkan pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di Jawa Tengah juga secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2007 realisasi total dana perimbangan sebesar Rp19,139 triliun dan menjadi sebesar Rp33,845 triliun pada tahun

anggaran 2014. Sedangkan total PAD mengalami kenaikan yang konsisten dari tahun anggaran 2007 sampai 2013, namun kemudian sedikit menurun pada tahun anggaran 2014.

Dari aspek makro ekonomi, berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) nilai total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) riil kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang positif dan selalu bertumbuh secara konsisten setiap tahun. Pada tahun 2007 nilai PDRB riil seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar Rp135.318.562 juta dan pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp192.011.408 juta.

Total belanja daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami perkembangan yang positif secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2007 total belanja daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp22.378.754 juta, terus meningkat setiap tahun hingga pada tahun anggaran 2014 mencapai sebesar Rp53.462.617 juta. Dari total belanja tersebut, sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk keperluan belanja pegawai, hal ini mengindikasikan masih besarnya beban pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dasar pemerintahannya dibandingkan dengan alokasi untuk belanja yang produktif seperti belanja modal.

Peningkatan kegiatan ekonomi membuat pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sebagai respon terhadap perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat tersebut. Sejalan dengan teori-teori mengenai pengeluaran pemerintah, dimana pengeluaran pemerintah akan

meningkat seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu negara atau wilayah.

Berdasarkan perkembangan data dan hasil-hasil penelitian terdahulu, layak untuk dikaji bagaimana pengaruh PDRB, dana perimbangan, dan PAD terhadap alokasi belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pasca diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan tingkat perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat dan kemandirian fiskal yang bervariasi antar daerah diduga terjadi pengaruh yang positif dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diangkat judul mengenai **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Data yang dihimpun dari BPS Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus meningkat, hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan PDRB setiap tahunnya. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pelayanan publik yang memadai sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu pemerintah juga berperan untuk mengatur hubungan-hubungan yang semakin kompleks dalam masyarakat sebagai antisipasi maupun penanggulangan terjadinya kegagalan pasar.

Tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan yang bersumber dari dana perimbangan menunjukkan tingginya tingkat

ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat. Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan utama bagi pemerintah daerah. Dengan kata lain besaran belanja daerah bergantung pada besaran dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

PAD sebagai sumber pendanaan mandiri daerah dan mencerminkan besar kecilnya kapasitas fiskal daerah. Pendapatan yang berasal dari PAD dapat digali secara mandiri oleh daerah, kemudian dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di masing-masing daerah. Akan tetapi porsi PAD terhadap total penerimaan daerah masih rendah jika dibandingkan dengan penerimaan yang berasal dari transfer, terutama transfer pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut dengan studi kasus di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap alokasi Belanja Daerah?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap alokasi Belanja Daerah?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi Belanja Daerah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap alokasi Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap alokasi Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai perilaku pemerintah daerah terhadap kebijakan dana transfer untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan teori-teori aplikasi ekonomi publik.

2. Kegunaan Praktis

Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menyikapi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah terutama dalam aspek pemberian dana transfer.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dan struktur penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Pada bab kedua akan diuraikan landasan teoritis menjelaskan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, yang didukung dengan penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya, sehingga timbul adanya hipotesis atau dugaan awal penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga dijelaskan definisi operasional yang mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel-variabel dalam penelitian. Metode analisis mendeskripsikan jenis atau model analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Pada bab keempat diuraikan tentang deskripsi objek. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data dianalisis, dalam pembahasan dijelaskan implikasi dari hasil analisis data dan interpretasi yang dibuat dalam penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab lima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Dan saran sebagai masukan pada penelitian mendatang. Saran-saran yang diajukan untuk perbaikan pelaksanaan maupun praktek di lapangan dan perbaikan penelitian berikutnya berdasarkan penerapan teori yang digunakan.